

**TINDAK PIDANA TERHADAP KEPEMILIKAN SATWA YANG  
DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NO:  
610/PID.SUS/2012/PN.DPK)**

**Ayu Larasati**

**Abstrak**

Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan didalamnya, diantaranya berbagai macam satwa. Satwa merupakan aset Negara yang tidak ternilai harganya. Pentingnya peranan setiap unsur dalam pembentukan lingkungan hidup bersifat mutlak tak tergantikan. Kepemilikan satwa untuk kepentingan pribadi, tanpa kita sadari akan berimbas semakin sedikitnya jumlah spesies satwa tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat permasalahan tentang Perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap kepemilikan satwa langka tanpa izin. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan teori perlindungan hukum yang di kaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data utama adalah data sekunder. Simpulan dari Penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap kepemilikan satwa yang dilindungi telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No.5 Tahun 1990. Perlindungan terhadap kepemilikan satwa juga telah dirumuskan dalam bentuk perlindungan secara preventif dan represif. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai larangan memiliki satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dengan ancaman sanksi dalam Pasal 40 ayat (2) bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.

Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Kepemilikan Satwa yang dilindungi, Tindak Pidana

***CRIMES AGAINST OWNERSHIP FAUNA THAT ARE SEEN AS PROTECTED BY THE LAW OF NUMBER 5 YEARS 1990 ABOUT NATURAL RESOURCE CONSERVATION BIOLOGICAL AND ITS ECOSYSTEM ( Case Studies Decisions Number : 610/PID.SUS/2012/PN.DPK)***

**Ayu Larasati**

***Abstract***

*The nation of Indonesia having the diversity riches there in, Including various kinds of animals. For is an asset state that is not priceless. The important role every element in the formation of living environment is absolute irreplaceable. Possession of animals for their personal interest, Without us realizing could effect increasingly smaller the number of species the animals. Hence in this study raised problems of legal protection of animals protected according to a rare laws number 5 years 1990 and accountability the criminal possession of rare for wildlife without permission. To answer these problems using theory writer legal protection associated with the theory of criminal accountability. This research using the methodology normative juridical with the data major is secondary data. The conclusions from the study is as protected laws against ownership fauna thar are seen number 5 years 1990. Ownership for has also formulated in the form of protection in preventive and repressive. Criminal accountability the suspect ownership a protected species according to the laws of number 5 years 1990, regarding the ban having a protected species stipulated in article 21 paragraph (2) with the threat of sanctions in article 40 subsection 2 for those who breach these stipulations to be imposed imprisonment of 5 (five) long years and fined of Rp. 100.000.000.*

*Keywords : Living environment, Possesion of a protected species, Criminal Act*